

**PEMBERDAYAAN BIROKRASI DAN KOMUNITAS**  
**— Revitalisasi Fungsi dan Tugas Birokrasi**  
**Pemerintah bagi Pembangunan—**  
**(Bureaucracy and Community Empowerment: Revitalization of**  
**Function and Task of Bureaucrat for**  
**Community Development)**

**SURADI**

**Abstract** Developing a program and its implementation in social welfare sector is influenced by the policy and strategy chosen by the bureaucracy. Strategy chosen for economic growth or GNP causes less priority in social welfare sector because economical doesn't give any direct benefit. These unreflected thoughts will lead bureaucracy to difficulties related to the national, regional and international community development. Community development currently demands some conditions as a consequence of the membership of a state in a regional organization or an international organization as well as of international monetary institutions and other donor states. Regarding to this frame, the bureaucracy revitalization in all level becomes a rational demand and a strategic choice in the efforts to build social welfare for all people.

**Kata Kunci:** Revitalisasi fungsi dan tugas birokrasi, birokrasi, sentralistis pembangunan

---

**1. PENDAHULUAN**

Birokrasi dan masyarakat atau rakyat, merupakan dua elemen dalam sebuah negara. Keduanya menjadi elemen penentu arah dan pencapaian tujuan sebuah negara tersebut. Sehubungan dengan itu, tulisan ini mencoba menggali konsep dan pemikiran-pemikiran terkait dengan birokrasi dan pembangunan masyarakat. Tulisan ini didasari oleh realitas dalam praktik pembangunan, bahwa kebijakan, pendekatan dan strategi pembangunan apa pun yang

dipilih birokrasi, mempengaruhi dan menentukan kinerja pembangunan sektoral, termasuk sektor atau bidang kesejahteraan sosial, baik yang dilaksanakan instansi pemerintah maupun LSM.

Sebaik apapun program pembangunan kesejahteraan sosial dirancang, selama kebijakan pembangunan masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau GNP, dominasi dan intervensi birokrasi pemerintah sangat kuat pada berbagai sektor, dan bias-bias pemikiran masih tumbuh subur di kalangan administrator

pembangunan, maka program pembangunan kesejahteraan sosial hanya akan menghasilkan angka-angka kuantitatif - administratif. Angka-angka disajikan dengan baik, namun belum mencerminkan keberhasilan secara fungsional yang sesungguhnya.

Sehubungan dengan itu, bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang pembangunan pekerjaan sosial, baik sebagai perencana, peneliti maupun pekerja sosial, perlu mendalami persoalan kebijakan makro. Dengan begitu, dapat menelusuri bagan alur kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sampai menjadi program dan kegiatan teknis dalam bentuk pelayanan atau pun bantuan sosial. Sebagaimana dalam proses penyusunan program di Departemen Sosial, maka para perencana program dan peneliti dalam usahanya menghasilkan rencana program maupun TOR penelitian yang baik, perlu memahami kebijakan makro mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, keputusan Menteri Sosial dan kebijakan teknis pada unit-unit terkait. Di sinilah relevansinya bagi perencana, pekerja sosial dan peneliti bidang kesejahteraan sosial memahami kebijakan makro tersebut.

Sebagaimana dikemukakan pada topik bahasan di atas, yaitu *Birokrasi dan Pembangunan Masyarakat*, banyak literature yang dapat dijadikan rujukan dalam mendalami persoalan-persoalan sekitar kebijakan makro (lihat Moelyarto, 1996; Effendi, 1991; Ginandjar, 1997; Bryant and White, 1989); Thee Kian We, 1981). Di dalam berbagai literature tersebut, diuraikan secara rinci dan mendalam pilihan-pilihan strategi pembangunan di Dunia Ketiga, termasuk Indonesia. Pada kasus

Indonesia khususnya dimasa Orde Baru, strategi pembangunan yang dipilih birokrasi pemerintah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau *growth oriented strategy*. Implementasi strategi pembangunan yang dilaksanakan mulai Pelita I ini menimbulkan kontroversial. Terjadinya pertumbuhan GNP yang menggembirakan pada awal tahun 80-an, yang mengangkat derajat negeri ini secara spektakuler dari kekurangan pangan menjadi kelebihan pangan (sampai ekspor). Banyak pihak yang mengakui kondisi ini sebagai keberhasilan dari pilihan strategi pembangunan. Namun demikian, di sisi lain ditemukan kekecewaan karena belum tercapainya pemerataan pendapatan, tingginya angka pengangguran dan besarnya jumlah penduduk miskin, baik absolut maupun relatif. Menurut D. Kuntjara Jakti (Mulyanto dan Ever, 1982) beratus juta penduduk hidup dalam batas kehidupan yang tidak layak, tanpa jaminan untuk memenuhi kebutuhan utamanya seperti pangan, sandang dan pangan juga kesehatan dan pendidikan bagi anaknya.

Hasil penelitian Hendra Esmara dan Sundrum mengenai Indonesia menunjukkan, bahwa terjadinya pembagian pendapatan yang merosot menyertai pertumbuhan ekonomi yang pesat selama dasa warsa 1970-an. Untuk daerah perkotaan se Jawa, selama masa 1970-1976 pembagian pendapatan memburuk, terutama di ibu kota Jakarta (Thee, 1986 : 12). Hal ini berarti bahwa teori *trickle-down effect* tidak dapat dipertahankan. Sebagaimana dikemukakan oleh Soebroto (Mulyanto dan Ever, 1982 : 4) bahwa penambahan produksi pada kenyataannya tidak mampu memecahkan masalah bagaimana masyarakat mencukupi kebutuhan pokok



hidup yang diperlukan. Terbukti bahwa kenaikan GNP bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.

Menyadari kegagalan pilihan strategi pertumbuhan ekonomi, pada akhir tahun 80-an dan memasuki awal tahun 90-an, yaitu pada Pelita III, pemerintah menentukan pilihan pada strategi pemenuhan kebutuhan dasar. Namun demikian, prioritas masih tetap pada target pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan di tingkat regional maupun internasional. Karena itu, bagi masyarakat pilihan strategi kedua ini pun tidak membawa perubahan yang berarti dalam upaya meningkatkan derajat kehidupan masyarakat yang manusiawi.

Kegagalan pilihan strategi pembangunan semasa Orde Baru, mendorong dicarinya pendekatan baru dalam pembangunan, yaitu strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sosial dasar bagi setiap orang, yang mendukung tersedianya SDM yang berkualitas dan kompetitif dalam kehidupan global. Permasalahannya, untuk menemukan strategi pembangunan bukanlah sesuatu yang mudah. Euforia reformasi yang telah membuka pikiran kalangan menengah tentang kelemahan-kelemahan pilihan strategi di masa Orde Baru, mengantarkan mereka pada kehidupan politik praktis. Karena itu, agenda untuk menentukan pilihan strategi pembangunan yang tepat sesuai dengan tuntutan globalisasi, sampai saat ini belum dapat dirumuskan. Kemana arah reformasi pun belum dapat diketahui.

---

## **2. BIROKRASI DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN**

Birokrasi dapat dipahami sebagai serangkaian jabatan dan tugas yang diorganisasikan secara formal yang dikaitkan dengan perincian yang hierarkhis, serta berada di bawah peraturan yang juga formal. Birokrasi dalam pengertian ini paling banyak dipraktekkan pada pemerintah, Maka tidak dapat terelakkan, birokrasi selalu dikonotasikan dengan pemerintah (Loekman Soetrisno, 1995). Pandangan masyarakat, bahwa birokrasi itu adalah (dikonotasikan) pemerintah membawa implikasi pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap pemerintah. Kesalahan yang terjadi di jajaran birokrasi dilihat oleh masyarakat sebagai kesalahan pemerintah, dan begitu sebaliknya. Berbagai literature akhirnya mengakomodasi berbagai pemikiran dan pandangan ini, bahwa birokrasi yang dimaksud yaitu pemerintah atau eksekutif. Dalam tulisan ini pun digunakan istilah birokrasi untuk mendeskripsikan proses-proses dan hasil kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Dalam rangka mendalami pembangunan masyarakat di Indonesia yang dikaitkan dengan birokrasi pemerintah, perlu melihat ke belakang apa yang pernah dilakukan oleh birokrasi pemerintah, terutama menyangkut pilihan strategi pembangunan. Pengalaman Indonesia selama lebih 30 tahun merupakan guru yang bijak. Pendekatan pembangunan yang dipilih pemerintah masa Orde Baru, pada kenyatannya membawa pengaruh yang kurang menguntungkan bagi kehidupan masyarakat, khususnya

secara sosio-kultural maupun politik. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa birokrasi pemerintah masa Orde Baru memilih strategi pertumbuhan pada awal pelaksanaan pembangunan, dan kemudian dikoreksi dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar, meskipun masih ada prioritas di bidang ekonomi. Pilihan strategi ini pada kenyataannya tidak mampu menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Sebaliknya, beberapa kebijakan pembangunan malah semakin memiskinkan rakyat, sebagaimana dikenal dengan kemiskinan struktural.

Sehubungan dengan pilihan strategi pembangunan masa Orde baru tersebut, Korten (Moelyarto, 1996) berpendapat, bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui *centrally imposed blueprint plan*, yang dirumuskan oleh teknokrat, dan alokasi sumber pembangunan yang sentralistis cenderung mengkerdikan (*to cripple*) potensi masyarakat. Kecenderungan menerapkan pendekatan pembangunan yang demikian, menumbuhkan hubungan ketergantungan antara rakyat dengan birokrat. Karena itu sifatnya menjadi *disempowering*, menekan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan kemampuannya. Hubungan ketergantungan yang demikian ini tercermin di dalam kebutuhan terus menerus akan input pembangunan yang dialokasikan dari atas atau dari luar. Eksistensi dan kelangsungan suatu proyek pembangunan akan terjamin selama didukung oleh input yang bersumber dari luar. Sebaliknya, proyek akan mengalami hambatan, dan bahkan kegagalan apabila input dari luar tersebut dihentikan.

Di samping menyebabkan terjadinya ketergantungan masyarakat terhadap birokrasi, sentralisasi dan birokratisasi yang kuat dalam pengelolaan pembangunan akan menimbulkan struktur birokrasi amat hierarkhis dan legalistis. Hal ini menyebabkan prosedur lebih diarahkan untuk memenuhi tuntutan struktur daripada pertimbangan produktivitas. Fleksibilitas dan arus komunikasi menjadi terhambat, dan birokrasi menjadi sangat kaku dan lamban. Ditambahkan oleh Effendi (1991), bahwa peranan birokrasi yang kuat dan dominan dalam pengelolaan program pembangunan, juga menimbulkan etos kerja yang memaksa para pejabat untuk mempertahankan status quo. Sifatnya yang menonjol adalah semangat untuk menjaga keseimbangan, dan kurang mementingkan perubahan dan kemajuan.

Terjadinya sentralistis pembangunan pada masa Orde Baru, menurut Ginanjar (1996) disebabkan oleh adanya bias-bias pemikiran pada administrator pembangunan, yaitu (1) dimensi rasional, material dan ekonomi lebih penting dari dimensi moral, kelembagaan dan sosial, (2) pendekatan dari atas lebih sempurna, (3) masyarakat lebih memerlukan materiil daripada teknologi dan manajerial, (4) teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu lebih baik, (5) lembaga yang berkembang di masyarakat tidak efisien dan efektif, (6) ukuran efisiensi pembangunan diukur dari tingkat pertumbuhan, (7) orang miskin masla dan bodoh, dan (8) sektor pertanian kurang produktif untuk investasi besar-besaran. Terjadinya bias-bias pemikiran pada administrator pembangunan tersebut, menurut Bryant dan White (1989) merupakan bukti



bahwa sebuah birokrasi Indonesia mengalami *phatalogy bureaucratic*, yang ditandai dengan (1) terpisahnya organisasi pemerintah dengan lembaga lain, dari masyarakat dan dari tujuan tradisional, (2) kecenderungan birokrasi untuk menjadi kaku dan rutin. Organisasi herakhis cukup kuat menekan para anggota agar berdisiplin, mendefinisikan loyalitas dalam hubungan dengan ketaatan terhadap peraturan-peraturan, dan (3) semua keputusan dibuat di puncak, dan dengan demikian mengurangi otoritas pada pejabat dalam berbagai tingkatan.

### 3. AGENDA REVITALISASI BIROKRASI

Istilah revitalisasi, menurut Kamus Bahasa Indonesia (Wojowasito, 1987), berarti menghidupkan kembali atau menguatkan kembali. Atas dasar pengertian ini, maka pengertian revitalisasi dalam konteks birokrasi pemerintah, dipahami dalam pengertian reposisi dan reorientasi fungsi dan tugas birokrasi pemerintah dalam pembangunan. Dalam pengertian ini, bagaimana seharusnya birokrasi pemerintah mendistribusikan kekuasaan dan sumber-sumber yang dimiliki, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Dengan demikian dominasi birokrasi pemerintah dalam kebijakan maupun program, akan menjadi berkurang secara proporsional. Sebagaimana dikemukakan oleh Drucker (Ginjar, 1996) dalam bukunya "*Management : Task, Responsibility, Practices*", bahwa apa yang dapat dilakukan lebih baik atau sama baiknya oleh masyarakat, hendaknya jangan dilakukan oleh pemerintah. Pemikiran

Drucker ini diperkuat oleh Gidden (1999), di mana ia tidak percaya bahwa perubahan ke arah masyarakat yang lebih adil dapat dicapai dengan meningkatkan peran negara. Gidden menunjukkan bukti empiris yang jelas tentang gagalnya rezim komunis di Uni Soviet, Eropa Timur, bahkan juga Republik Rakyat Cina. Kemudian dalam pembahasan "*Negara dan Civil Society*", Gidden menegaskan kembali, bahwa isunya bukan peranan pemerintah yang lebih besar atau lebih kecil, tetapi adanya pengakuan bahwa pemerintah harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru abad global, dan bahwa otoritas, termasuk legitimasi negara, harus diperbaharui secara aktif.

Kemudian dikemukakan oleh Bowman dan Hamton (Supriyatna, 1997), bahwa munculnya tuntutan de-birokratisasi, desentralisasi, de-konsentrasi, devolusi dan privatisasi di karenakan ketidakpedulian pemerintah pusat untuk melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan pembangunan sampai ke daerah. Pemikiran Bowman dan Hamton ini diperkuat oleh Bintoro (1988), bahwa adanya tuntutan tersebut karena aktivitas pembangunan tidak mengembangkan keswadayaan dan keswakaryaan masyarakat. Meskipun demikian birokrasi itu tetap penting. Sebagaimana dikemukakan oleh Wilson (Ginjar, 1996) dalam bukunya "*Bureaucracy : What Government Agencies Do and Why They Do it*", bahwa birokrasi tetap diperlukan, tetapi harus tidak birokratis.

Menyadari berbagai kelemahan pendekatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan, maka demi kesinambungan pembangunan ini diperlukan pendekatan baru, yang lebih

berorientasi pada rakyat sebagai pusat dari kegiatan pembangunan (*people centered development*). Sehubungan dengan itu, langkah pertama dan utama yang perlu dilakukan adalah merevitalisasi birokrasi pemerintah, mulai tingkat pusat, propinsi dan kabupaten. Makna dari revitalisasi di sini, yaitu adanya upaya ke arah mereposisi dan pengembangan reorientasi fungsi, tugas dan peranan birokrasi pemerintah tersebut dalam pembangunan masyarakat. Sasono (1992) mengemukakan pemikirannya, bahwa dalam upaya membangun keswadayaan nasional. Berbagai elemen kebijakan pembangunan masa lalu (Orde Baru) perlu ditinjau kembali, yaitu (1) peranan birokrasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan, (2) sentralisasi perencanaan dan pengelolaan sumber daya, dan (3) titik berat alokasi sumber daya ke arah pertumbuhan ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti, apakah elemen-elemen kebijakan pembangunan selama ini masih relevan dengan situasi yang telah berubah dengan cepat dewasa ini.

Dalam perspektif administrasi, Saxena dan Bennis (Effendi, 1997) mengemukakan, bahwa pelaksanaan tugas-tugas pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas tidak memerlukan birokrasi post-tradisional yang stabil-mekanistik, melainkan suatu struktur birokrasi modern yang lebih organis-adaptif. Organisasi ini lebih terbuka terhadap gagasan peningkatan kapasitas, sehingga lebih mampu menggerakkan partisipasi dalam pelaksanaan program. Sejalan dengan pemikiran Saxena dan Bennis tersebut, Mouzelis (Moelyarto, 1995) yang

mengikuti pemikiran *Hegelian Bureaucracy* mengemukakan, bahwa sebuah birokrasi diciptakan hendaknya untuk melaksanakan fungsi sebagai penghubung antara negara dengan *civil society*. Negara menjejawantahkan kepentingan umum, sedangkan *civil society* merepresentasikan kepentingan khusus yang ada di dalam masyarakat. Keberhasilan birokrasi diukur dari keberhasilannya untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan khusus di dalam masyarakat tadi, dan menginkorporasikannya di dalam kepentingan umum negara. Dengan demikian yang terkait di dalam birokrasi dalam konsepsi Hegel, seberapa jauh birokrasi dapat menyalurkan kepentingan-kepentingan khusus tadi, sehingga tercermin di dalam kepentingan umum. Ditambahkan oleh Apter (Supriyatna, 1999), bahwa birokrasi pemerintah harus mengakomodasikan, menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui berbagai kebijakan yang tetap bertopang pada nilai-nilai budaya bangsa, sehingga perilaku birokrasi yang sesuai dengan nilai kultur dan kepentingan bersifat integral.

Oleh karena itu, pendekatan *top-down* tidak mungkin lagi dipertahankan atau harus ditinggalkan, sehingga istilah "pembinaan" sudah saatnya diganti dengan "pelayanan", dan sikap birokrasi pemerintah yang serba mengatur dirubah menjadi sikap penyerahan kepada mekanisme pasar. Dengan adanya pendekatan dan sikap ini, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik berganti menjadi desentralistik, dan kebijakan pembangunan sangat mempertimbangkan sifat-sifat *local specific*. Birokrasi



pemerintah mengurangi dominasinya kepada rakyat, dan menyerahkan kepada rakyat untuk menentukan pilihan-pilihan dan membuat keputusan yang menyangkut dirinya. Pendekatan pembangunan demikian yang oleh Korten (Moelyarto, 1995) dikatakan dengan pendekatan *people centered development*, yaitu pendekatan pembangunan yang mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi rakyat berdasarkan kekhasan lokal. Selama ini kebijakan pembangunan di Indonesia mengabaikan kekhasan lokal ini, padahal di dalam kekhasan lokal tersebut terdapat kearifan dan pranata sosial yang sudah terbukti efektif sebagai mekanisme pemecahan masalah di tingkat akar rumput. Pengabaian terhadap kemampuan pranata sosial lokal ini oleh sebagian pengamat sosial dipandang sebagai salah satu kondisi yang menyebabkan terjadinya konflik sosial dengan kekerasan antar kelompok masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan menempatkan manusia atau rakyat sebagai pusat pembangunan, menurut Ginanjar (1997) terdapat beberapa pemikiran paradigma baru pembangunan yang lebih berorientasi keadilan, dan yang tidak *centralized*, yaitu (1) birokrasi harus membangun partisipasi. Partisipasi harus dilandasi oleh kesadaran dan bukan paksaan serta dilakukan melalui kelompok-kelompok masyarakat, (2) birokrasi hendaknya tidak cenderung berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih berorientasi kepada yang lemah dan kurang berdaya. Sikap demikian ini dilandasi oleh pemahaman dan kepedulian akan masalah yang dihadapi oleh rakyat lapisan bawah, (3) peranan aparatur

negara harus sudah bergeser dari pengendalian menjadi pengarah, dan dari memberi menjadi memberdayakan. Asumsi bahwa pemerintah pasti dan senantiasa lebih tahu apa yang terbaik untuk rakyat, sudah harus ditinggalkan, (4) mengembangkan keterbukaan (*transparency*) dan pertanggungjawaban (*accountability*) Keterbukaan ini akan membawa suasana yang menggerakkan partisipasi dan dengan demikian akan menghidupkan demokrasi.

Kemudian Giddens (1999) dalam bukunya *"The Third Way : The Renewal of Social Democracy"* mengajukan pemikiran "Jalan ketiga" antara sosialisme dan kapitalisme, atau antara intervensi negara dan pasar bebas yang masih menjadi perdebatan. "Jalan Ketiga" ini merepresentasikan pembaharuan demokrasi sosial, sebagai tuntutan atas agenda demokrasi yang terpadu, dinamis dan berjangkauan luas. Dalam politik "Jalan Ketiga", sebagai pendekatan untuk membangun demokrasi sosial, Giddens menawarkan daftar sejumlah peranan pemerintah yang perlu dilaksanakan, di mana peranan tersebut tidak dapat digantikan oleh pasar maupun LSM. Peranan pemerintah tersebut, yaitu (1) menyediakan sarana untuk perwakilan kepentingan yang beragam, (2) menawarkan sejumlah forum untuk rekonsiliasi kepentingan yang saling bersaing, (3) menciptakan dan melindungi ruang publik yang terbuka, dimana debat bebas mengenai isu-isu kebijakan bisa dilanjutkan, (4) menyediakan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan warga negara, termasuk bentuk-bentuk keamanan dan kesejahteraan kolektif, (5) mengatur pasar menurut kepentingan publik, dan menjaga persaingan pasar ketika

monopoli mengancam, (6) menjaga keamanan sosial melalui kontrol sarana kekerasan dan melalui penetapan kebijakan, (7) mendukung perkembangan SDM melalui peranan utamanya dalam sistem pendidikan, (8) menopang sistem hukum yang positif, (9) memainkan peran ekonomis secara langsung, sebagai pemberi kerja dalam intervensi makro maupun mikro ekonomi, serta penyediaan infrastruktur, (10) membudayakan masyarakat dan pemerintah dalam merefleksikan nilai dan norma yang berlaku secara luas, tetapi juga bisa membantu membentuk nilai dan norma tersebut dalam sistem pendidikan dan sistem lainnya, dan (11) mendorong aliansi regional dan transnasional, serta meraih sasaran-sasaran global.

Dalam pembahasan selanjutnya, Giddens mengajukan pemikirannya tentang "Negara Demokrasi Baru" atau negara tanpa musuh sebagai strategi untuk mewujudkan *civil society*, yaitu (1) negara harus merespon globalisasi secara struktural melalui desentralisasi, (2) negara harus memperluas peran ruang publik, yang berarti reformasi konstitusional yang diarahkan pada transparansi yang lebih besar, (3) untuk mempertahankan atau memperoleh legitimasi, negara harus meningkatkan efisiensi administratif, (4) negara harus dapat mencari bentuk-bentuk demokrasi yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara luas, dan (5) pemerintah sebagai pengelola risiko, dan (6) pendemokrasian demokrasi terjadi mulai dari tingkat lokal, regional dan nasional.

Pemikiran Giddens tersebut perlu diperhitungkan oleh jajaran birokrasi di Indonesia, sebagai pilihan pendekatan

pembangunan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, yaitu "mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

---

#### 4. SIMPULAN

Sebagai wujud komitmen terhadap nasib bangsa dan masa depan negeri ini, maka birokrasi pemerintah dan administrator pembangunan pada semua tingkatan, perlu menentukan pilihan strategi pembangunan yang tepat. Pengertian tepat mengandung makna, (1) bahwa pilihan strategi pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Perdebatan sekitar ukuran kesejahteraan tidak perlu diperpanjang, karena yang diperlukan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan serta berpartisipasi dalam pembangunan, dan (2) kesiapan bangsa ini menghadapi pasar bebas dalam era globalisasi yang mensyaratkan SDM yang kompetitif. Bangsa di mana pun tidak bisa menghindar dari arus globalisasi ini, dan karena itu kualitas bangsa ini menjadi prioritas, baik menyangkut aspek kecerdasan, kreativitas dan mental.

---

#### PUSTAKA ACUAN

- Abdullah Syarwani, dan MG. Rochman (ed), (1992), *Pengembangan Keswadayaan Nasional*, LP3ES: Jakarta.
- Adi Sasono, (1992), "Kondisi Kemasyarakatan dalam Mewujudkan Keswadayaan Nasional", dalam Abdullah



- Syarwani dan MG Rochman, *Pengembangan Swadaya Nasional*, LP3ES : Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo, (1992), "Perspektif Pembangunan Menjelang Tahun 2000" dalam Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya AR, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan : Perkembangan Teori dan Penerapan*, LP3ES : Jakarta.
- Bryant, Louise and G. White, (1989), *Manajemen Pembangunan di Negara-Negara Berkembang*, LP3ES: Jakarta.
- Giddens, Anthony, (1999), *The Third Way (Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial)* (Ketut Arya Mahardika: penterjemah), Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Ginanjari Kartasasmita (1996), *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dengan Pemerataan*, CIDES : Jakarta
- , (1997), *Administrasi Pembangunan: Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia*, LP3ES: Jakarta.
- Kian Wie, Thee (1981), *Pemerataan, Kemiskinan dan Ketimpangan: Beberapa Pemikiran tentang Pertumbuhan Ekonomi*, Sinar Harapan: Jakarta.
- (1986), *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan: Beberapa Pendekatan Alternatif*, LP3ES: Jakarta.
- Loekman Soetrisno, (1995), *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Kanisius Press: Yogyakarta.
- Mulyanto Sumardi dan Hans-Diter Ever.(ed). (1982). *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. CV.Rejawali: Jakarta..
- Sofyan Effendi, (1991), "Sistem Administrasi dan Pembangunan Berkelanjutan", dalam *Samodra Wibawa*, red), Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Tjahya Supriyatna (1997), *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, HUP-Press: Bandung.
- Tjokrowinoto Moelyarto (1995), *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*, Tiara Wacana: Yogyakarta.